

PERAN AUSTRALIAN AGENCY OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT (AUSAID) MELALUI PROGRAM MAMPU DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Catur Pamungkas Hardhana¹
Nim. 1102045082

Abstract

This study aims to determine the role of Ausaid in an effort to empower women in Indonesia through the program MAMPU by using the concept of international organizations and the concept of women's empowerment. The research method used in preparing this thesis is descriptive type. Data collection techniques used literature study and online research, using secondary data types. Analytical technique used is qualitative analysis. The results indicate that AusAID's role through the MAMPU program in women's empowerment in Indonesia is to work with civil society organizations, the Indonesian government, parliaments and other stakeholders at the central and regional levels to improve policies, regulations and access to government services affecting women poor in five thematic areas such as Improving Women's Access to the Government of Indonesia's Social Protection Programs, Improving Women's Access to Employment and eliminating discrimination in the workplace, Improving the conditions of migration of women workers abroad, Strengthening women's leadership for improved maternal and reproductive health, and Strengthening Women's leadership to reduce violence against women.

Keywords: AusAID, MAMPU, Empowerment of Women

Pendahuluan

Indonesia berkomitmen untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan fokus kepada agenda pembangunan di masa depan. Pemerintah kemudian meunjukkan komitmen untuk mengurangi kemiskinan, koordinasi, dan pengawasan dari strategi pengurangan kemiskinan nasional. Meskipun begitu, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam upaya untuk menjangkau dan melayani masyarakat miskin, terutama bagi kaum perempuan. Kaum perempuan dimana secara proporsional lebih rentan dan miskin, namun sering tidak terjangkau oleh program dan layanan publik. Serta beberapa masalah lainnya yang dihadapi perempuan di Indonesia adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan menjadi salah satu masalah utama dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: aragiyamoto@yahoo.com

Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan sangat diperlukan karena kualitas kehidupan perempuan yang masih jauh lebih rendah daripada laki-laki. Permasalahan perempuan di Indonesia seperti tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan, masih adanya kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang juga tercermin dari masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan ke layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas (<http://untuknkri.org>, diakses pada 24 Agustus 2017).

Menyikapi kondisi yang memprihatinkan ini, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Pemerintah Australia yang diwakili oleh kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) meluncurkan kerjasama dalam upaya pengentasan kemiskinan, yang dinamakan “Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan” atau program MAMPU. Program yang diluncurkan pada tahun 2012 dan diresmikan oleh perwakilan kedua pemerintah ini memusatkan fokus pada perempuan miskin dan organisasi-organisasi perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan miskin.

MAMPU, singkatan dari *The Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction Program*, ialah Program untuk penanggulangan kemiskinan yang merupakan investasi dari pemerintah Australia melalui AusAid. AusAid (*Australian Agency For International Development*) adalah lembaga pemerintah Australia yang bertanggung jawab untuk mengelola program bantuan luar negeri Australia. Pada 31 Oktober 2013 AusAid diintegrasikan ke Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, DFAT (*Department of Foreign Affairs and Trade*). Tujuan dari program bantuan Australia adalah untuk membantu negara-negara berkembang mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan kepentingan nasional Australia. Selain masalah pembangunan dan kemiskinan, AusAid juga memprioritaskan terhadap pemberdayaan perempuan.

MAMPU adalah program inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan publik dan penghidupan bagi perempuan miskin di Indonesia dengan cara memperkuat organisasi-organisasi perempuan dan organisasi yang berkepentingan terhadap isu gender serta anggota parlemen untuk mempengaruhi kebijakan dan layanan di lima isu strategis (<http://www.mampu.or.id>, diakses pada 24 Agustus 2017) Program MAMPU telah dirancang sebagai program delapan tahun (2012-2020) yang terdiri dari dua tahap dimana tahap pertama dari tahun 2012 hingga 2016, dan tahap kedua yaitu dari tahun 2016-2020. Dan juga dengan diharapkan adanya perubahan dari hasil jangka pendek (2-3 tahun), kemudian hasil jangka menengah (3-5 tahun), dan hasil jangka panjang (5-8 tahun). MAMPU berharap untuk melihat perbaikan akses perempuan terhadap peningkatan akses dan penghidupan bagi perempuan miskin di Indonesia.

Tujuan program ini adalah: Membangun jaringan berbasis luas dan koalisi inklusif yang dipimpin oleh memperkuat organisasi perempuan dan organisasi yang berkepentingan gender, dan anggota parlemen untuk mempengaruhi kebijakan, peraturan dan layanan pemerintah, dan di arena sektor swasta terpilih, untuk

memperbaiki akses masyarakat wanita miskin untuk layanan kritis (AusAID, 2012) Berdasarkan hasil analisis dan konsultasi telah mengidentifikasi lima wilayah tematis dimana reformasi akan menghasilkan perbedaan yang signifikan bagi perempuan miskin dan dimana ada peluang yang menjanjikan untuk mencapai perubahan yang signifikan:

1. Memperbaiki akses perempuan terhadap program perlindungan social pemerintah.
2. Meningkatkan akses perempuan terhadap pekerjaan dan menghapus diskriminasi di tempat kerja.
3. Memperbaiki kondisi migrasi tenaga kerja perempuan di luar negeri.
4. Memperkuat kepemimpinan perempuan untuk kesehatan ibu dan reproduksi yang lebih baik.
5. Memperkuat kepemimpinan perempuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

Ada beberapa contoh dimana organisasi masyarakat sipil yang diminati perempuan atau yang tertarik mengenai permasalahan gender di Indonesia telah membentuk koalisi yang mengutamakan kepentingan tersebut, dan telah berhasil mencapai reformasi pemerintah yang signifikan. Program ini akan membangun kekuatan dari organisasi-organisasi ini untuk meningkatkan efektivitas dan menciptakan hasil yang lebih baik. Program ini mendukung pemilihan perempuan nasional dan organisasi yang berkepentingan gender dan mitra lokal mereka untuk membentuk koalisi dengan orang lain di sektor publik dan swasta. Beroperasi melalui berbagai pihak, dengan organisasi yang bertugas menganalisis kendala yang terjadi, mengidentifikasi dan mencari solusi, bekerja sama dengan media, dan menggunakan basis bukti untuk menganjurkan perubahan.

Berbeda dengan kebanyakan program masyarakat sipil, program ini akan menghubungkan langsung organisasi perempuan dan gender ke tingkat tertinggi pemerintahan melalui pengawasan dan pengelolaan strategis Komisi Wakil Presiden untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan (TNP2K). Program ini juga akan mendukung organisasi tersebut untuk bekerja dengan parlemen nasional dan lokal, serta advokat gender laki-laki mendukung parlemen sebagai cara untuk memobilisasi anggota parlemen laki-laki dan perempuan untuk melakukan advokasi reformasi dari dalam pemerintah.

Upaya program untuk memperkuat organisasi dan jaringan perempuan dan gender merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Kesuksesan program ini akan dimulai sejauh mana hal tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kehidupan perempuan miskin. Diperkirakan bahwa dalam kerangka waktu delapan tahun, program ini akan menghasilkan perubahan dalam kebijakan, peraturan dan layanan pemerintah yang secara langsung akan menguntungkan lebih dari tiga juta perempuan miskin di Indonesia.

Program ini telah dirancang dengan bantuan sepuluh organisasi perempuan dan organisasi yang berkepentingan gender dan merupakan bagian lintas mitra lokal. Perwakilan senior dari organisasi nasional ini telah meninjau, merevisi dan mendukung tujuan program, tujuan yang diinginkan, dan teori perubahan; pengaturan tata kelola dan pengelolaan program dan nama program. Sejalan dengan pendekatan

partisipatif ini, perancangan program menyediakan kerangka kerja dan mitra yang menyeluruh akan didukung untuk mengembangkan inisiatif mereka secara rinci selama tahun pertama pelaksanaan (pendekatan perancangan dan implementasi). Hal ini memberikan fleksibilitas kepada masyarakat sipil untuk merancang prakarsa yang didasarkan pada mandate, pengalaman dan pengetahuan mereka tentang apa yang sesuai dengan konteks Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan praktik terbaik internasional dalam bidang gender, namun sejalan dengan komitmen AusAID terhadap mitra pendukung untuk mendorong perubahan jangka panjang.

Keberhasilan MAMPU akan dinilai dengan mengukur sejauh mana program ini dapat memperluas akses layanan publik dan membawa perbaikan penghidupan dan kesejahteraan bagi perempuan miskin di Indonesia. Diperkirakan bahwa setelah berlangsung selama 8 tahun dengan berdampak pada kebijakan, peraturan, dan sistem layanan publik, program ini akan memberi kontribusi positif bagi lebih dari 3 juta perempuan miskin di Indonesia.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Organisasi Internasional

Manusia, dengan kesadaran hidup untuk hidup bermasyarakat dan memenuhi kepentingan bersama inilah yang mendorong lahirnya sebuah organisasi sebagai wadah atau alat untuk mencapai tujuan bersama. Demikian pula suatu negara tidak dapat menjalankan kepentingan dan kebutuhan nasionalnya dengan lancar tanpa ada hubungan atau interaksi dengan negara lainnya, memicu untuk mendirikan organisasi internasional sebagai wadah atau sarana untuk melaksanakan kerjasama (Wursanto, 2002). Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan berbagai peraturan agar dapat berjalan dengan tertib, dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai wadah hubungan antar negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjalin dalam konteks hubungan internasional.

Organisasi internasional sendiri dapat didefinisikan sebagai struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas sebuah kesepakatan bersama antar anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggota-anggotanya.

Menurut Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr, organisasi internasional merupakan suatu pengaturan dari bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara. Umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala (Maman, Seherman, 2003). Ada tiga unsur utama dari organisasi internasional yaitu keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama, adanya pertemuan-pertemuan secara berkala, dan adanya staf yang bekerja sebagai pegawai sipil internasional (*International Civil Servant*).

Di dalam buku *International Organization*, Clive Archer menyebutkan organisasi internasional berasal dari dua kata yaitu organisasi dan internasional. Kata internasional diartikan dalam beberapa makna. Pertama, intergovernmental yang berarti interstate atau hubungan antar wakil resmi dari negara-negara yang berdaulat.

Kedua, aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga hubungan intergovernmental untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas, dan dapat dibagian lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan. Bisa mnyangkut tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintahan negara-negara sebagai anggota atau *Intergovernmental Organizations* (IGO) serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau *International Non-Governmental Organizations* (INGO). Dalam hal jangkauan keanggotaan, organisasi internasional ada ang kenaggotaanya terbatas dalam wilayah tertentu saja, dan satu jenis lagi dimana keanggotaanya mencakup seluruh wilayah di dunia.

Clive Archer kemudian mendefinisikan organisasi internasional sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (Pemerintah dan Non Pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersamanya.

Tujuan dari organsasi internasional yaitu salah satunya untuk menciptakan suatu bentuk hubungan antara anggota yang *co-operative* dalam berbagai aspek seperti perdagangan dan sosial, meminimalisir atau mencegah kemungkinan terjadinya *conflict* dengan kerjasama sehingga akan menimbulkan rasa saling menghormati kepentingan nasional masing-masing negara, merangsang timbulnya *confrontation* karena ternyata pada akhirnya organisasi tersebut merangsang terjadinya konflik. Setiap organisasi internasional memiliki fungsi dan peran masing-masing sesuai dengan tujuan organisasi internasional tersebut (Perwita, Yani, 2005).

Peran organisasi internasional dapat dikategorikan kedalam tiga kategori (Archer, 1983):

1. *Sebagai instrument.*

Organisasi internasional digunakan untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan politik luar negerinya. Suatu instrumen menunjukkan tujuannya apabila memperlihatkan kegunaannya dalam periode tertentu. Biasanya terjadi pada *intergovernmental organizations*. Dimana anggota-anggotanya merupakan negara berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional. Sedangkan pada *non governmental organizations* tindakannya mencerminkan perilaku dari anggotanya yang berupa kelompok perdagangan, organisasi bisnis, partai politik, atau kelompok gereja.

2. *Sebagai Arena.*

Organisasi internasional merupakan tempat bertemu anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Organisasi internasional menyediakan tempat-tempat pertemuan bagi para anggota untuk berkumpul berama-sama untuk berdiskusi, berdebat, bekerjasama, maupun saling berbeda pendapat. Organisasi internasioal menyediakan kesempatan bagi para anggotanya untuk lebih meningkatkan pandangan serta usul dalam suatu forum politik dimana hal seperti ini tidak dapat diperoleh dalam diplomasi bilateral.

3. *Sebagai aktor independen.*

Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Sejak tahun 1960-an terdapat bukti-bukti bahwa sejumlah entitas termasuk organisasi internasional dapat mempengaruhi kejadian-kejadian dunia. bila hal ini terjadi, entitas-entitas tersebut menjadi aktor dalam arena internasional dan saingan bagi negara. kemampuan entitas tersebut dalam beroperasi sebagai aktor internasional dan transnasional dapat dibuktikan karena mengidentifikasi diri dan kepentingannya melalui badan-badan korporasi, bukan melalui negara.

Konsep Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah upaya perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan dari hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, menjadi masyarakat berdaya (Novian, 2010).

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami perempuan dalam mencapai pemerataan dan persamaan akses serta hak laki-laki dan perempuan pada setiap tingkat proses pembangunan.

Pemberdayaan perempuan bukan bermaksud menciptakan perempuan lebih unggul dari laki-laki kendati menyadari pentingnya peningkatan kekuasaan, namun pendekatan ini mengidentifikasikan kekuasaan bukan sebagai dominasi yang satu terhadap yang lain, melainkan lebih condong dalam kapasitas perempuan meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal. Dalam hal ini bahwa yang diperjuangkan dalam pemberdayaan perempuan adalah pemenuhan hak mereka untuk menentukan pilihan dalam kehidupan dan mempengaruhi arah perubahan melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol atas sumber daya material dan nonmaterial yang penting (Daulay, 2006).

Linda Mayoux (Mayoux, 2004) menyatakan bahwa terdapat lima unsur utama yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai berikut :

1. *Welfare* (Kesejahteraan)

Aspek ini dapat dikatakan sebagai salah satu aspek yang penting dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam akses terhadap kesejahteraan, perempuan menempati posisi yang tidak menguntungkan. Kesejahteraan ini dibagi ke dalam tiga unsur utama sebagai berikut :

- a) Partisipasi ekonomi perempuan merupakan hal yang penting tidak hanya mengurangi level kemiskinan pada perempuan, melainkan pula sebagai langkah penting untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendorong pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan.

- b) Sementara pencapaian pendidikan merupakan aspek paling fundamental dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, tanpa memperoleh pendidikan yang memadai, perempuan tidak mampu mengakses pekerjaan sektor formal, mendapatkan upah yang lebih baik, berpartisipasi dalam pemerintahan dan mencapai pengaruh politik.
 - c) Kesehatan dan Kesejahteraan merupakan sebuah konsep yang terkait dengan perbedaan substansial antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses nutrisi yang cukup, kesehatan, fasilitas, reproduksi, dan untuk mengemukakan keselamatan fundamental dan integritas seseorang.
2. *Access* (Akses)
Akses diartikan sebagai kemampuan perempuan untuk dapat memperoleh hak/akses terhadap sumber daya produktif seperti tanah, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran, tenaga kerja, dan semua pelayanan publik yang setara dengan perempuan. Akses terhadap teknologi dan informasi juga merupakan salah satu aspek penting lainnya.
 3. *Consientisation* (Konsientisasi)
Pemahaman atas perbedaan peran jenis kelamin dan peran gender.
 4. *Participation* (Partisipasi)
Kesetaraan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan, kebijakan, perencanaan, dan administrasi. Partisipasi ini merujuk pada keterwakilan perempuan yang setara dalam struktur pembuatan keputusan baik secara formal maupun informal, dan suara mereka dalam penformulasian kebijakan mempengaruhi masyarakat mereka.
 5. *Equality Of Control* (Kesetaraan dalam kekuasaan)
Kesetaraan dalam kekuasaan atas faktor produksi, dan distribusi keuntungan sehingga baik perempuan maupun laki-laki berada dalam posisi yang dominan.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu : Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*Input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*Opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang-berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan

masyarakat, Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutup dari interaksi. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi semakin tergantung pada berbagai program pemberian (*Charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif dimana memberikan gambaran secara jelas mengenai peran AusAid melalui program MAMPU di Indonesia. Jenis data penelitian adalah menggunakan data sekunder, yaitu data – data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, majalah, tabloid, jurnal, internet, dan jenis data sekunder lain yang saling berkaitan dan dapat menjelaskan fenomena yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam Teknik Analisis Data, data – data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut, penulis menggunakan teknik kualitatif yaitu menekankan pada pengumpulan dan analisis teks tertulis atau diucapkan secara sistematis untuk menjelaskan masalah yang diteliti oleh penulis sehingga dapat dipahami. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah telaah pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur yang mendukung penelitian. Literatur ini berupa jurnal, buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan situs-situs internet laporan ataupun yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan tingkat kapabilitas dan validasinya terhadap permasalahan yang dihadapi dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Penelitian

Peran AusAID (*Australian Agency For International Development*) Melalui Program MAMPU Dalam Pemberdayaan perempuan di Indonesia dapat dijelaskan melalui konsep Organisasi Internasional oleh Clive Archer. Berdasarkan konsep organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer, dimana dijelaskan dalam konsep tersebut bahwa suatu negara tidak dapat menjalankan kepentingan dan kebutuhan nasionalnya dengan lancar tanpa hubungan atau interaksi dengan negara lainnya, memicu untuk mendirikan organisasi internasional sebagai wadah atau sarana untuk melaksanakan kerja-sama. Maka dari itu, dengan adanya berbagai permasalahan perempuan yang dipicu dari lemahnya sektor pendidikan, kurangnya akses dalam kesehatan, permasalahan dalam pekerjaan dan diskriminasi, kekerasan dalam rumah tangga, dan lemahnya partisipasi perempuan dalam politik, sehingga pemerintah Indonesia melalui BAPPENAS tergerak melakukan kerjasama dengan Australia melalui AusAID dengan Program MAMPU. Tujuan dari kerjasama ini dimaksudkan dapat meminimalisir permasalahan yang dihadapi Indonesia khususnya dalam hal permasalahan perempuan, sehingga dengan adanya kerjasama tersebut permasalahan perempuan di Indonesia diharapkan dapat diatasi. Untuk itu Indonesia melalui BAPPENAS dan Australia melalui AusAID bekerja-sama dengan menciptakan berbagai kebijakan yang termasuk dalam Program MAMPU yang direalisasikan melalui kerjasama internasional. Dalam kerjasama ini Australia berperan sebagai Instrumen dimana organisasi Australia yaitu AusAID sebagai organisasi penyedia dana terhadap negara yang bermasalah khususnya negara Indonesia berdasarkan periode yang telah disepakati. Selain itu, selain sebagai pemberian dana, AusAID juga bertanggung jawab atas arahan strategis dan wewenang untuk pengambilan keputusan

secara keseluruhan untuk alokasi dana kepada mitra kerja MAMPU. Hal ini membuat AusAID menjadi peran penting dalam proses pejaminan mutu dan persetujuan untuk setiap kegiatan dalam pemberdayaan perempuan melalui MAMPU. AusAID juga memiliki peran sebagai pengawas berlangsungnya program dan pendataan dari hasil program berdasarkan target yang sudah diterapkan.

Karyawan atau petugas dari AusAID diharapkan untuk secara teratur melakukan perjalanan ke lapangan untuk memantau berlangsungnya kegiatan setiap program, serta berpartisipasi dalam konferensi internasional dan nasional, lokakarya dan lainnya. Jika sesuai, staff akan ikut berpartisipasi dalam meninjau program termasuk proses pemantauan atau monitoring serta mengevaluasi hasil program. Sangat penting bagi staf program untuk melakukannya dalam memahami secara mendalam bagaimana program ini bekerja di tingkat lokal dan nasional serta apa saja yang bisa dipelajari oleh AusAID dari model kinerja tersebut. Staf AusAID juga harus didorong untuk mempertahankan forum pembelajaran dengan pendonor serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendistribusikan keberhasilan program, dan untuk menumbuhkan kesadaran tentang nilai kepemimpinan perempuan dalam mendorong perubahan. Biaya partisipasi ini termasuk dalam anggaran program.

Selain itu, program pemerintah lainnya ikut berkontribusi pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dimana dengan bantuan organisasi masyarakat sipil (OMS) bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, parlemen dan berbagai pemangku kepentingan lainnya di tingkat pusat dan daerah untuk menyempurnakan kebijakan, peraturan dan akses terhadap layanan pemerintah yang berdampak pada perempuan miskin dalam lima area tematik :

1. *Memperbaiki Akses Terhadap Program Perlindungan Sosial Pemerintah Indonesia.*

Pemerintah Indonesia saat ini memprioritaskan untuk membangun sebuah sistem nasional dalam perlindungan sosial sebagai titik dasar dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Meskipun tidak ada pembatasan formal bagi perempuan untuk mengakses program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan tersebut, tidak dapat dipungkiri masih terdapat rintangan yang tidak kasat mata yang dapat menghambat perempuan untuk memanfaatkan layanan tersebut.

2. *Meningkatkan akses perempuan terhadap pekerjaan dan menghapus diskriminasi di tempat kerja.*

Di Indonesia, partisipasi angkatan kerja perempuan dalam 10 tahun terakhir ini meningkat hingga mencapai sekitar 51 persen. Persoalannya, angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka partisipasi angkatan kerja laki-laki yang mencapai 85 persen . Selain itu, pada jenis-jenis pekerjaan yang sama, upah perempuan Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan upah laki-laki, selisih ini bahkan mencapai 25 persen. Dalam sektor ketenagakerjaan formal, misalnya, tenaga kerja perempuan difokuskan terhadap pekerjaan dan sektor yang dianggap lebih 'perempuan', seperti pekerjaan di lingkungan pabrik dan pekerjaan domestic. Perbedaan pekerjaan ini berkontribusi terhadap kesenjangan pendapatan di mana perempuan pada umumnya tidak mendapatkan upah yang sama dibanding laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Perempuan juga lebih besar

kemungkinannya bekerja di lingkungan keluarga, baik yang mendapatkan upah maupun yang tidak, serta mengerjakan lebih banyak pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan. Padahal, bagi perempuan (miskin) akses terhadap kerja yang dibayar (Dan juga bekerja mandiri) merupakan strategi penting untuk meningkatkan pendapatan dan mengatasi kemiskinan. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa akses terhadap peluang pasar tenaga kerja secara positif dapat membawa dampak pada kehidupan perempuan miskin secara lebih luas. Sebuah penelitian menemukan bahwa memperluas akses peluang pekerjaan bagi perempuan dapat meningkatkan pemberdayaan SDm bagi anak perempuan serta ditundanya usia pernikahan dan melahirkan bagi perempuan.

3. *Memperbaiki kondisi migrasi tenaga kerja perempuan di luar negeri.*

Di banyak negara, termasuk di Indonesia, migrasi tenaga kerja antarnegara merupakan pilihan utama untuk bertahan hidup, terutama bagi masyarakat di daerah pedesaan. Migrasi kerja antarnegara menjadi penyangga ketika perubahan cuaca mengganggu produksi pertanian atau terjadi krisis ekonomi. Keluarga di desa bertahan hidup dengan mengandalkan kiriman uang dari sanak keluarga yang bekerja di luar negeri. Banyak perempuan yang memilih bekerja di luar negeri berasal dari daerah-daerah termiskin di Indonesia. Kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan pendidikan formal merupakan faktor penyebab semakin meningkatnya jumlah perempuan Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri, ditambah lagi dengan adanya peluang untuk mendapatkan upah yang relatif tinggi dibandingkan di desa-desa mereka. Terlepas dari hal itu, sistem ketenagakerjaan di Indonesia, baik yang mengatur pengiriman tenaga kerja luar negeri maupun perlindungan atas hak-hak mereka, memang belum berfungsi dengan baik. Tingginya tingkat penganiayaan yang dialami pekerja Indonesai di luar negeri selalu menjadi berita utama di media. Diperburuk dengan sistem pendukung sosial ekonomi yang tidak berjalan dengan baik. Pemerintah sesungguhnya telah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki proses migrasi tenaga kerja ini, namun besarnya kepentingan perusahaan-perusahaan yang memperoleh keuntungan dari praktik buruk yang terjadi saat ini, telah menghambat terjadinya perubahan penting dalam sistem tersebut.

4. *Memperkuat kepemimpinan perempuan untuk kesehatan ibu dan reproduksi yang lebih baik.*

Isu-isu terkait hak reproduksi memiliki sejarah panjang dan kontroversial di Indonesia. Program Pemerintah Orde Baru untuk mengendalikan fertilitas erat dikaitkan dengan definisi sosial atas peran perempuan di masyarakat sebagai pihak yang mendukung laki-laki sebagai pemimpin dan bukan melihat perempuan sebagai pemimpin itu sendiri. Pada saat yang sama, organisasi masyarakat sipil seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menggunakan dialog global melalui form seperti Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan di Kairo pada 1994 untuk menggugat stereotip gender. Mereka juga meluncurkan jaringan nasional organisasi akar rumput yang memanfaatkan isu hak-hak reproduksi untuk mendorong dialog di tingkat lokal tentang peran perempuan. Perdebatan itu masih berlanjut hingga saat ini, dan isu hak reproduksi dan hak seksual merupakan salah satu isu kontroversi utama antara organisasi fundamentalis dan para pendukung kesetaraan gender. Perempuan dan anak

perempuan yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan berat untuk mendapatkan hak kesehatan reproduksi mereka. Faktor sosial yang menentukan untuk mencapai hasil di bidang kesehatan reproduksi adalah sumber daya keuangan, pendidikan, dan kekuatan pengambilan keputusan/status perempuan dalam keluarga. Kerangka hukum dan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan reproduksi memperkuat stereotip gender tentang perempuan dan ibu dengan adanya undang-undang dan kebijakan yang bersifat tidak adil atas dasar status pernikahan. Ini juga sekaligus menutup kemungkinan bagi perempuan dan anak-anak perempuan yang tidak menikah mendapatkan layanan kesehatan reproduksi secara penuh.

5. *Memperkuat kepemimpinan perempuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan.*

Hal yang paling merusak dan mengakibatkan ketidakseimbangan hubungan antar gender serta pembagian kekuasaan adalah kekerasan terhadap perempuan. Hal yang sering mengakibatkan gangguan kesehatan baik fisik maupun psikologis, bahkan kematian. Bagi perempuan miskin, kekerasan berdampak pada kemampuan mereka mengatasi kemiskinan, yang kemudian berpengaruh pada kemampuan mereka mewujudkan hak-hak memperoleh rasa aman, perumahan yang layak, kesehatan, lapangan kerja, pangan, pendidikan, serta untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Selama 13 tahun terakhir, Komisi Nasional anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) mencatat sebanyak 400.939 kasus kekerasan terhadap perempuan (termasuk kawin paksa). Begitupun KOMNAS perempuan meyakini bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan sesungguhnya lebih tinggi. Ini terjadi karena banyaknya kasus yang tidak dilaporkan. Pemahaman utuh atas tingkat kekerasan terhadap perempuan terhalang oleh ketiadaan data akurat dari seluruh Indonesia. Data yang dicatat KOMNAS Perempuan dan mitra-mitranya itu hanya salah satu dari sedikit sekali sumber yang tersedia dan karenanya penting bagi proses advokasi. Di Indonesia kekerasan terhadap perempuan sesungguhnya telah dianggap sebagai tindak pidana, namun implementasi tindakan hukum belum berjalan efektif karena masih terhalang norma-norma adat yang memandang kekerasan semacam itu sebagai bagian dari persoalan pribadi. Meskipun dilaporkan ke polisi, sering kali kasus kekerasan tersebut tidak ditindaklanjuti. Di tingkat desa, perempuan cenderung melaporkan penganiayaan yang mereka alami pada para tokoh informal dan atau perangkat desa. Sebagai akibatnya, sebagian besar kasus-kasus seperti itu diselesaikan melalui jalur informal di bawah pengawasan perangkat desa yang sering kali mengabaikan soal perlindungan. Pemerintah Indonesia sudah mencoba memberikan layanan bagi korban tindak kekerasan, namun jumlahnya masih terbatas dan lokasinya belum merata. Kementerian Sosial, misalnya, mengelola tempat penampungan dan klinik trauma bagi para korban perdagangan manusia. Sedangkan kepolisian republik Indonesia mengoperasikan beberapa pusat layanan terpadu yang memberikan layanan medis bagi para korban tindak kekerasan.

Pada tahun 2012, Pemerintah Australia dan Indonesia sepakat untuk bekerja sama dalam sebuah inisiatif baru untuk mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan miskin di seluruh Indonesia. Program *'Pemberdayaan Perempuan Indonesia untuk*

Penanggulangan Kemiskinan' atau *Maju Perempuan Indonesia* untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU), didanai oleh Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) yang dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dari Pemerintah Indonesia. MAMPU mendukung jaringan dan koalisi inklusif dari organisasi perempuan dan organisasi yang mempunyai kepentingan terhadap gender, dan anggota parlemen (Mitra MAMPU) untuk membantu mempengaruhi kebijakan, peraturan, dan layanan pemerintah, dan di area sektor swasta yang terpilih. Pada akhirnya, tujuan program ini adalah meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia terhadap layanan dan memperbaiki penghidupan mereka.

Berdasarkan konsultasi desain program MAMPU dan penelitian internasional, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh jaringan dan koalisi yang berusaha memajukan reformasi perempuan di Indonesia :

1. *Kurangnya kapasitas organisasi dan jaringan perempuan yang ada.*

Selama perencanaan dan konsultasi program, pihak monitor atau kepala petugas keamanan telah mengidentifikasi berbagai bidang area yang dapat didukung oleh program termasuk keterampilan analitis dalam pemetaan dan mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data penelitian (Terutama data mengenai perempuan), pengalaman dalam merumuskan dan melaksanakan strategi, membuat jaringan yang selaras dengan tujuan program, membangun kerja sama dengan beberapa pihak, memantau dan mengevaluasi kegiatan untuk menginformasikan pekerjaan di masa depan.

2. *Keadaan Sosial dan Politik di Indonesia.*

Konteks sosial dan politik di Indonesia terkadang tidak dapat mendukung pemberdayaan perempuan di Indonesia. Salah satu penyebab utama di Indonesia saat ini adalah munculnya fundamentalisme agama dan keyakinan tertentu yang membatasi perempuan di arena publik. Hal ini menghadirkan gelombang perlawanan yang meningkat terhadap pemberdayaan perempuan. Kurangnya dukungan dari pemerintah setempat juga merupakan salah satu faktor lainnya.

3. *Permasalahan Internal dalam Organisasi Perempuan.*

Dinamika internal organisasi perempuan dapat menghambat kerja kolektif mereka. Karakteristik seperti masalah pribadi dan persaingan, dan hubungan kekuasaan yang asimetris antara perempuan dan di dalam organisasi pada tingkat yang berbeda menghadirkan tantangan untuk tindakan terpadu

4. *Kesulitan dalam mengumpulkan dana dan ketergantungan pada donor eksternal.*

Kelemahan organisasi masyarakat sipil Indonesia pada umumnya yang terdapat pada sebagian besar organisasi adalah yang berusaha mengadopsi sistem LSM manajemen profesional barat namun tidak memiliki keanggotaan yang tetap dan melimpah, ini menjadi salah satu ketidakmampuan mereka untuk mengumpulkan dana di dalam negeri. Jadi mereka bergantung pada donor internasional sebagai sumber pendapatan utama mereka.

5. *Kesenjangan organisasi lokal dan organisasi nasional.*

Secara umum, ada perbedaan antara tingkat lokal dan nasional dalam organisasi perempuan, dan di antara mereka dan mitra lokal mereka. Kelompok-kelompok wanita di tingkat lokal mengungkapkan rasa frustrasi terhadap kelompok-kelompok nasional yang mereka anggap memaksakan agenda mereka sendiri tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Di sisi lain, kelompok nasional mengakui kesulitan dalam berurusan dengan apa yang mereka rasakan sebagai kurangnya kapasitas mitra mereka di tingkat lokal.

Pada akhirnya, dari semua permasalahan perempuan di Indonesia, tidak semuanya dapat terbantu oleh dari program MAMPU. Dimana salah satunya adalah di bidang pendidikan dimana dari kebijakan MAMPU yang ada tidak ada membahas mengenai perbaikan akses perempuan terhadap bidang pendidikan. Tapi, dari berbagai pendekatan yang MAMPU lakukan dalam upaya memberdayakan perempuan di Indonesia, MAMPU juga melakukan berbagai pengarahan seperti edukasi dan sebagainya dari bidang politik, pekerjaan, kesehatan, serta menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga serta pekerja TKI. MAMPU mewujudkan misi dan visinya yang sesuai dengan kelima program dengan cara bekerja sama dengan berbagai organisasi nasional lainnya serta lembaga swadaya masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan.

MAMPU saat ini telah beroperasi di 27 provinsi, 201 kabupaten / kota, dengan lebih dari 750 kabupaten dan menjangkau lebih dari 2390 desa. Wilayah kerja MAMPU secara bertahap akan diperluas sampai tahun 2020. Ada lebih dari 8 juta orang Indonesia yang saat ini tinggal di desa tempat mitra kerja MAMPU dimana lebih dari 4 juta diantaranya adalah perempuan. Mitra MAMPU telah membentuk 816 anggota kelompok di tingkat lokal, dengan 14309 wanita dan 330 pria sebagai anggota.

Dari hasil program MAMPU menunjukkan bahwa 3 tahun selama beroperasi, MAMPU telah menghasilkan kemajuan yang lebih kuat berdasarkan dari target dan desain yang diharapkan. Kapasitas organisasi mitra kerja MAMPU telah meningkat semenjak mengikuti program ini pada pertengahan 2012 terutama pada organisasi masyarakat sipil. Dimana hasil ini sudah diantisipasi pada rancangan kebijakan program MAMPU. Terlepas dari keberagaman berbagai organisasi mitra program MAMPU, penilaian kapasitas program MAMPU menunjukkan bahwa MAMPU saat ini memiliki sistem manajemen organisasi yang lebih kuat, pengelolaan kebijakan yang semakin meningkat, dan telah mengembangkan kemampuan baru untuk meningkatkan posisi strategis yang berkaitan dengan visi dan misi jangka panjang program.

AUSAID melalui MAMPU telah menyediakan sumber dana lebih dari 21 juta dollar Australia dari pertengahan 2013 hingga Mei 2015. Dimana dana tersebut untuk mitra kerja MAMPU dan jaringan utama mereka berdasarkan tujuan program masing-masing. Enam puluh empat persen (64%) dari semua dana yang diberikan melalui 16 perjanjian hibah aktif sampai saat ini telah diberikan langsung kepada mitra kerja MAMPU. MAMPU sendiri telah memperluas kinerjanya ke operasi cakrawala. Dalam mengembangkan kapasitas program dan bantuan teknis, MAMPU telah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mengembangkan kapasitas organisasi

mitra kerja MAMPU dalam waktu perbulan . Bantuan teknis jangka pendek sebanyak 1239 pemasukan telah disediakan oleh MAMPU antara Mei 2013 dan Mei 2015. MAMPU telah mengenalkan program secara luas dimana telah mengadakan lebih dari 30 pertemuan dan diskusi bersama badan pemerintah nasional seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) .

Dari sepuluh mitra kerja nasional MAMPU, organisasi-organisasi tersebut memiliki kapasitas yang jauh lebih besar pada tahun 2015 dibandingkan pada tahun 2012 dimana program MAMPU baru dimulai. Penilaian kapasitas pada tahun 2015 menyoroti bahwa mitra-mitra kerja nasional MAMPU seperti Migrant CARE, BaKTI, dan 'Aisyiyah telah mengalami perubahan terbesar, PEKKA dan KPI mengalami evolusi secara bertahap, sementara KAPAL Perempuan telah berkembang di beberapa daerah namun masih mengalami stagnasi. Perubahan ini akan masih terus berlangsung selama masa beroperasinya MAMPU yang dari 2012 hingga 2020. Mitra nasional kerja MAMPU memberikan bantuan dan dana hibah kepada beberapa organisasi atau lembaga swadaya masyarakat yang bekerja secara lokal, dimana semua mitra dari berbagai manajemen dan struktur yang selaras dengan peraturan dan kebijakan program. Serta melakukan berbagai kegiatan yang mendukung tujuan dan satu tema dengan program MAMPU. Serta, berdasarkan data hasil dari program MAMPU menunjukkan bahwa pada bulan Mei 2015, MAMPU telah bekerja di lebih dari 2400 desa, 201 kabupaten, di 27 dari 33 provinsi di Indonesia.

Dalam upaya perubahan pengaruh dan hak suara perempuan, Mitra kerja MAMPU telah meningkatkan kontak dengan pembuat kebijakan di lima program utama MAMPU. Keterlibatan mitra kerja MAMPU dari pertengahan 2014 sampai Maret 2015 menunjukkan peningkatan kontak dengan pejabat pemerintah nasional, anggota parlemen daerah, dan media Indonesia. Data kuantitatif yang dikumpulkan oleh MAMPU telah menunjukkan bahwa mitra kerja MAMPU mengalami peningkatan kontak dengan pemerintah nasional, media, dan anggota parlemen di tingkat sub-nasional selama periode Oktober 2014 sampai Mei 2015.

Berdasarkan data kualitatif dari laporan mitra kerja dan catatan pemantauan MAMPU menunjukkan peningkatan pengaruh dan suara perempuan yang terjadi di berbagai cara, baik secara formal melalui audiensi, diskusi, konferensi, dan melalui kontak secara pribadi atau individu. Perubahan lainnya adalah adanya indikasi awal perbaikan akses terhadap layanan bagi perempuan miskin, meskipun hasil belum maksimal yang diharapkan sesuai dengan desain program. Berdasarkan data yang di dapatkan 'Aisyiyah, lebih dari 3700 wanita telah mengakses tes IVA dan Pap smear melalui klinik pemerintah di 67 desa di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan sejak Mei 2014. 'Aisyiyah juga berhasil mendaftarkan 156 perempuan miskin di kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, untuk skema asuransi kesehatan masyarakat baru yang memasang target kepada masyarakat miskin dan hampir miskin. Ini memberikan hak kepada wanita untuk menerima akses terhadap layanan kesehatan gratis di klinik kesehatan setempat. Tanda-tanda peningkatan akses terhadap layanan ini akan dipertahankan melalui sumber pendanaan pemerintah.

Bukti bahwa kenaikan ini akan bertahan terus cukup menjanjikan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah tes yang didanai oleh skema asuransi kesehatan pemerintah yang

dikelola oleh Badan Jaminan Sosial (BPJS) selama periode ini. Pemerintah provinsi Jawa Timur memiliki fokus yang kuat untuk memperluas cakupan skema asuransi kesehatan BPJS dan memastikan pembiayaan kesehatan yang memadai. Karenanya, otoritas kesehatan kabupaten akan lebih siap menghadapi peningkatan penggunaan asuransi kesehatan baru Pemerintah.

Dari lima program utama MAMPU dan berbagai kegiatan serta kerja sama yang dilakukan dengan mitra kerja maupun organisasi nasional serta lembaga swadaya masyarakat serta dari hasil jangka pendek selama beoperasinya MAMPU. MAMPU baru dapat mengatasi permasalahan perempuan di Indonesia dalam bagian hak suara perempuan dalam bidang politik serta perbaikan akses perempuan terhadap kesehatan. Namun, hasil tersebut masih merupakan hasil jangka pendek program yang masih akan berlangsung hingga tahun 2020. Sehingga masih belum dipastikan apakah dari setiap kelima program MAMPU tersebut dapat tercapai hasil yang diharapkan. Tapi, beberapa kemajuan sudah terbukti terutama di bagian hak suara perempuan dan akses perempuan terhadap kesehatan.

Kesimpulan

Berdasarkan judul penulis yaitu Peran AusAID (Australian Agency For International Development) Melalui Program MAMPU Dalam Pemberdayaan Perempuan di Indonesia, maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

Peran AusAID

Peran AusAID adalah sebagai pemberian dana modal, pencetus awal terciptanya program dengan persetujuan dan kerjasama BAPPENAS, maka terciptanya program MAMPU untuk memberdayakan perempuan di Indonesia. Selain itu, selain sebagai pemberian dana, AusAID juga bertanggung jawab atas arahan strategis dan wewenang untuk pengambilan keputusan secara keseluruhan untuk alokasi dana kepada mitra kerja MAMPU. Hal ini membuat AusAID menjadi peran penting dalam proses pejaminan mutu dan persetujuan untuk setiap kegiatan dalam pemberdayaan perempuan melalui MAMPU. AusAID juga memiliki peran sebagai pengawas berlangsungnya program dan pendataan dari hasil program berdasarkan target yang sudah diterapkan.

Hasil Program MAMPU dalam Pemberdayaan Perempuan di Indonesia.

Hasil jangka pendek program MAMPU belum cukup terlihat karena masih banyaknya permasalahan di berbagai sektor. Namun, bukan berarti tidak ada kemajuan sama sekali. Peningkatan terlihat dari hak suara perempuan serta perbaikan akses perempuan terhadap kesehatan. MAMPU baru dapat mengatasi permasalahan perempuan di Indonesia dalam bagian hak suara perempuan dalam bidang politik serta perbaikan akses perempuan terhadap kesehatan. Namun, hasil tersebut masih merupakan hasil jangka pendek program yang masih akan berlangsung hingga tahun 2020. Sehingga masih belum dipastikan apakah dari setiap kelima program MAMPU tersebut dapat tercapai hasil yang diharapkan.

Daftar Pustaka

Buku

AusAid, 2012. *Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction. Program Design Document Part A: Situational Analysis & Program Overview.*

Ade Maman, Seherman. 2003. Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regial dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi, Jakarta: Gihalia Indonesia.

Ig. Wursanto. 2002. Dasar-Dasar dan Ilmu Organisasi, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Perwita dan Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Rosda.

Mayoux, Linda. 2004. *Sustainable Learning for Women's Empowerment : Ways Forward in Microfinance*, London : ITDG Publishing.

Jurnal/Artikel

Daulay, Harmona. 2006. Pemberdayaan Perempuan: Studi Kasus Pedagang Jamu di Gedung Johor Medan. Jurnal Harmoni Sosial, Volume I Nomor I, September 2006.

Novian, Budhy. 2010. Sekilas Tentang Pemberdayaan Perempuan. Artikel Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.

Website

Mampu Program

<http://www.mampu.or.id/id/program-mampu>

Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak

<http://untukncri.org/peningkatan-kualitas-kehidupan-dan-peran-perempuan-serta-kesejahteraan-dan-perindungan-anak>